

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidiang)**

Oleh

**SRI DEWI MEAMOGU
E.11.17.044**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidiang)**

Oleh

**SRI DEWI MEAMOGU
E.11.17.044**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo

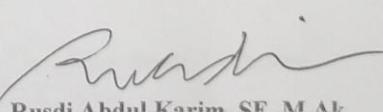
Gorontalo,.....2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Dr. Azhila, SE., M.Si
NIDN: 0907077401

Pembimbing II


Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak
NIDN: 0902086402

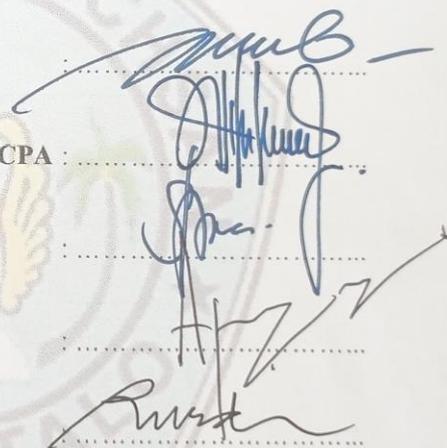
HALAMAN PERSETUJUAN

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
(Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidipang)**

OLEH :
SRY DEWI MEAMOGU
E.11.17.044

**Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo**

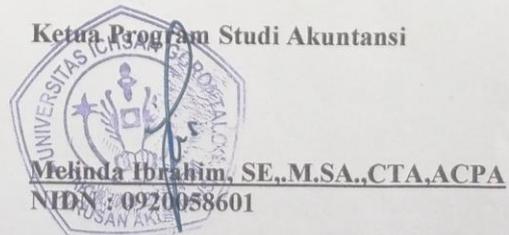
1. **Dr.Bala Bakrie,SE.,S.Psi., MM**
(Ketua Penguji)
2. **Melinda Ibrahim, SE.,M.SA.,CTA,ACPA**
(Anggota Penguji)
3. **Shella Budiawan, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **Dr. Arifin, SE., M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak**
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi
Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901



Ketua Program Studi Akuntansi
Melinda Ibrahim, SE., M.SA., CTA, ACPA
NIDN : 0920058601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademin (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022

Yang Membuat Pernyataan



SRY DEWI MEAMOGU
E.11.17.044

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang dikerjakannya.”(QS. Al-Baqarah:286).

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusanmu) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al-Insyirah:7-8).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Tak lupa pula Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberikan motivasi tentang kehidupan dan mengajari hidup bagi umatnya melalui sunnah-sunnahnya.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Ku persembahkan karya ini untuk :

KEDUA ORANG TUAKU

“Alm. Harun meamogu dan Ibu Rabia napu ”

Terimakasih untuk setiap doa kasih sayang, pengorbanan dan motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku, tanpa doa restu kalian aku tidak sampai dititik ini.

Kakak dan adik-Adik aku

Yang selalu memotivasi dan membantu dalam berbagai hal.

MEREKA YANG SELALU ADA

“Keluargaku, rekan-rekan kantor desa pontak dan kelas Akuntansi angkatan 2017 dan juga teman-teman yang tidak dapat disebutkan”

Dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada

“Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang sangat berjasa”

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU
2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah wasyukurillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidiang)”**, sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk dapat memenuhi gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan pengharapan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Keuda orang tua, yakni Bapak Alm. Harun Meamogu dan Ibu Rabia Napu yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, doa, dan cinta kasih terhadap penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhamad Ichsan gaffar, SE.,M.Ak, selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu pengetahuan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr.Musafir.,SE.,M.,Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Melinda ibrahim SE.Ak.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Arifin, SE.,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Rusdi Abdul Karim, SE.,M.Ak selaku Pembimbing II, atas waktu, tenaga, saran, dan perhatian, serta kesabarannya dalam membimbing penulis selama dalam

penyusunan skripsi ini, Seluruh staf dan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Saudara kandung serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi selama menempuh studi S1, dan Teman-teman kelas Jurusan Akuntansi Reguler B angkatan 2017, yang tekah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi S1, serta Pemerintah dan pengurus BUMDes Pontak, atas waktu dan tenaga serta informasi yang membantu menyelsaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan turut andil membantu penulis dalam proses penyelesaian kripsi ini dengan harapan semoga penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Gorontalo, 2022

SRY DEWI MEAMOGU

ABSTRAK

SRI DEWI MEAMOGU. E1117044. OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (PADA DESA PONTAK KECAMATAN KAIDIANG)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keoptimalan pengelolaan BUMDes Pontak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang. Hasil penelitian adalah pembahasan dari ketiga indikator tersebut yakni indikator pertama terkait dengan Tujuan dari dibentuknya BUMDes Pontak Kecamatan Kaidipang, hingga kini belum tercapai bahkan beberapa unit usaha justru tidak berjalan. Keputusan Alternatif yang menjadi indikator pengukur kedua belum dapat dipraktekan dengan baik pada pelaksanaan BUMDes Pontak, dibuktikan dengan Tidak adanya keputusan akternatif yang diambil untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Pontak. Indikator ketig yaitu, Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Pontak belum handal dalam melakukan pengelolaan dibuktikan dengan banyaknya pengurus yang kurang aktif. Pengelolaan BUMDes Pontak Kecamatan Kaidipang belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari tiga indikator pengukur yakni tujuan, keputusan alternatif, dan sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut belum dijalankan dengan baik.



Kata kunci: Optimalisasi, BUMDes

ABSTRACT

SRI DEWI MEAMOGU. E1117044. THE MANAGEMENT OPTIMIZATION OF THE VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (AT PONTAK VILLAGE, KAIDIPANG SUBDISTRICT)

This study aims to find the management optimization of Village Owned Enterprise at Pontak village This study uses a qualitative research method with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The object of this research is the Village Owned Enterprise at Pontak Village, Kaidipang Subdistrict. The results of the study indicate that there are three indicators, namely:

1) Concerning the first indicator referring the purpose of the establishment of Village Owned Enterprise at Pontak Village, Kaidipang Subdistrict, until now, it has not been achieved even some business units are not running, 2) Alternative decisions which become the second measuring indicator have not been practiced properly in the implementation of Village Owned Enterprise at Pontak Village, Kaidipang Subdistrict, proven by the absence of alternative decisions taken to improve and resolve problems that occur in the management of Village Owned Enterprise at Pontak Village, Kaidipang Subdistrict. The third indicator is that the human resources involved in the management of Village Owned Enterprise at Pontak Village, Kaidipang Subdistrict are not yet reliable in managing it, as seen in the number of inactive administrators. The management of Village Owned Enterprise at Pontak Village, Kaidipang Subdistrict has not been maximized. It can be seen from three measuring indicators namely purposes, alternative decisions, and human resources. These three aspects have not been properly implemented.

Keywords: optimization, Village Owned Enterprises



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Kajian Teori	9
2.1.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	9
2.1.2 Unit Usaha BUMDes	14
2.1.3 Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa	15
2.1.4 Optimalisasi Pengelolaan	16
2.1.5 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Objek Penelitian	23
3.2 Desain Penelitian dan Jenis Penelitian	23
3.2.1 Desain Penelitian	23
3.2.2 Jenis Penelitian	24

3.3 Operasional Variabel	24
3.4 Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.6 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pontak	30
4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi	31
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	34
4.1.4 Visi-Misi Desa Pontak	35
4.1.5 Gambaran Umum BUMDes Pontak	37
4.2 Hasil Penelitian.....	41
4.2.1 Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidipang	41
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Bumdes.....	52
4.2.3 Strategi yang Diterapkan untuk Pengoptimalan Pengelolaan BUMDes.....	58
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	60
4.3.1 Tujuan.....	60
4.3.2 Pengambilan Keputusan Alternatif	62
4.3.3 Sumber Daya Manusia	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
CURICULUM VITAE.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Sangadi Desa Pontak.....	30
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Dusun.....	32
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	33
Tabel 4.4 Jenis Pekerjaan.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Informan.....	71
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan.....	72
Lampiran 3 Dokumentasi.....	73
Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian.....	75
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian.....	75
Lampiran 6 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	77
Lampiran 7 Hasil Uji Plagiasi.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan wilayah atau kawasan pemukiman yang terdiri dari lapisan atau sekumpulan masyarakat yang mata pencahariannya berasal dari berbagai faktor. Serta memiliki kewenangan harus mengatur dan mengelola warga atau kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan dengan masyarakat dan berhak mengurus urusan pemerintahan. Berdasarkan prakarsa masyarakat tersebut, dan kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pembangunan pedesaan dapat langsung menyentuh kepentingan sebagian besar masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pembangunan pedesaan, pemerintah diposisikan sebagai subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kekuasaan, kewajiban untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Upaya penguatan dan penyeimbangan kapasitas pemerintah desa mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan desentralisasi hak pembangunan ke pedesaan, yang artinya konsep “keberagaman” dalam lambang negara menjadi jelas, dan prinsip desentralisasi juga memasukkan konsep keluarga pedesaan.

Pemerintah dalam melakukan pembangunan terhadap daerah yang tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan upaya untuk menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan melalui kementrian desa dengan

menetapkan empat prioritas penggunaan dana desayaitu salah satunya untuk pengembangan BUMDes bersama yang difokuskan pada beberapa bidang yaitu: (1) Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan pedesaan. (2) Pengembangan usaha layanan jasa. (3) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDes dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan modal sosial dan jembatan untuk memperkuat perekonomian pedesaan. BUMDes diharapkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan ekonomi pedesaan yang selalu gagal akibat intervensi pemerintah yang berlebihan. BUMDes pertama kali diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Bab XI tentang Desa. Kemudian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti: UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 Ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87-90, Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132-142, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indoneia No.2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88-89, serta Peraturan 3 Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No. 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes didukung oleh lembaga keuangan pedesaan (departemen pembiayaan) dalam operasionalnya yang melakukan transaksi keuangan dalam bentuk kredit dan tabungan. Jika sistem ekonomi kuat dan didukung oleh kebijakan yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi dan kemampuan mendistribusikan aset secara adil kepada masyarakat luas akan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir BUMDes adalah menjadi semacam modal sosial, yang diharapkan menjadi jembatan untuk memajukan dan memperkuat perekonomian pedesaan.

Badan Usaha Desa adalah organisasi niaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.2010 No. 39 Informasi tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembangunan ekonomi desa perlu didorong melalui berbagai kegiatan pengelolaan ekonomi pedesaan, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran desa. Pasal 87 Ayat 1 Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan usaha warga desa dilakukan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan berpartisipasi langsung di masyarakat diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut, setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulannya masing-masing. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Optimasi atau optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik. Jika tujuan

optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan, tidak selalu keuntungan tertinggi yang bisa diperoleh, atau jika tujuan optimasi adalah untuk meminimalkan biaya, tidak selalu memungkinkan untuk mengurangi biaya Minimal(Siringoringo:2005,4).

BUMDes dapat disebut sebagai alat otonomi desa, artinya pemerintah desa dapat mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, juga dapat digunakan sebagai alat kesejahteraan, yaitu melalui peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pengelolaan BUMDes, dan pemerintah Sebuah program yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Cara kerja BUMDes adalah dengan memasukkan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi ke dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berdasarkan potensi asli desa melalui kapasitas dan kewenangan desa. BUMDes yang dapat dijadikan sebagai poros kehidupan masyarakat pedesaan dapat dikatakan ideal, karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan mampu masuk ke seluruh masyarakat pedesaan. Tujuan didirikannya BUMDes adalah menjadi penggerak pembangunan daerah dan penggerak pembentukan departemen perusahaan di pedesaan, namun biaya produksi dan pengelolaannya tidak terlalu tinggi.

Di BUMDes, pengelolaan sumber daya manusia (dalam hal ini masyarakat desa) menjadi prioritas utama. Hal ini karena secara langsung maupun tidak langsung akan turut serta dalam kuantitas dan kualitas pengelolaan BUMDes dan proses pembentukan sumber daya manusia akan menentukan gerak dan hasil dari kegiatan BUMDes tersebut. Dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga

evaluasi, partisipasi masyarakat pedesaan di semua tingkatan membuktikan keberhasilan BUMDes. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu aparat desa dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan BUMDes dan meningkatkan kualitas pengelolaan BUMDes oleh aparat desa.

Beberapa Kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Utara khususnya di kecamatan kaidipang terdapat beberapa desa yang mendirikan BUMDes, ada BUMDes yang dikelola secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada, dan ada juga BUMDes yang dikelola oleh masyarakat namun didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulant permodalan awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Desa Pontak merupakan salah satu Desa dari 15 Desa yang berada di Kecamatan Kaidipang yang berada di wilayah daratan/hamparan yang dikelilingi perkebunan dan persawahan. Desa Pontak memiliki relief daerah dataran. Desa Pontak merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sector pertanian.

Desa pontak memiliki BUMDes di dua bidang, yakni bidang pertenakan dan bidang pertanian (kios saprodi) . Namun dari dua usaha milik desa ini satu diantaranya sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi. Hingga saat ini terkonfirmasi hanya BUMDes di bidang pertanian yang masih aktif dan senantiasa berjalan sesuai dengan rencana awal, usaha-usaha dengan kategori lain sudah tidak aktif lagi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Suratni Umuli selaku bendahara BUMDes Pontak :

“Dari beberapa badan usaha milik desa, yang berjalan sampai saat ini hanya tersisa usaha kios saprodi di bidang pertanian, Usaha-usaha yang lain sudah tidak berjalan lagi. Hal ini disebabkan kurangnya keaktifan dari pengurus BUMDes itu sendiri. Saya sebagai bendahara bekerja sendiri oleh karena itu ada baiknya untuk pemugaran kembali mengingat ketua, sekretaris dan anggota lain tidak lagi turut serta lagi” (25 Desember 2020)

Melihat fakta lapangan yang ada nyatanya, tidak semua BUMDes berjalan dengan semestinya dan tentunya hal ini berpengaruh pada pemasukan bagi PADes. Berdasarkan wawancara tersebut tidak berjalannya BUMDes ini memiliki banyak alasan, salah satunya adalah kurangnya keaktifan pengurus BUMDes, jelas sekali bahwa hal ini dapat mempengaruhi manajemen pengelolaan BUMDes. Kurangnya keaktifan pengurus ini akan mengakibatkan kekosongan pelaksana sehingga BUMDes tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Pontak tentang BUMDes juga sangat berpengaruh. Lemahnya pengetahuan masyarakat terkait BUMDes akan berdampak pada besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam ikut serta mendukung dan membangun BUMDes itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal tersebut dapat diuraikan permasalahan awal yakni sebagai berikut: (1) Rendahnya kemampuan teknis (technical skill) dalam pengelolaan BUMDes; (2) Rendahnya kemampuan aparat desa dalam mengelola BUMDes (skill Hammer); (3) Rendahnya kemampuan konseptual desa equipment (Concept skill), yaitu kemampuan intelektual untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan dan kegiatan BUMD dalam perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu atas dasar uraian diatas, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidipang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana optimalisasi pengelolaan BUMDes pada Desa Pontak Kecamatan Kaidipang ?
2. Apa faktor-faktor penghambat pengelolaan BUMDes sehingga tidak optimal?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan untuk pengoptimalan pengelolaan BUMDes?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi pengelolaan BUMDes pada Desa Pontak Kecamatan Kaidipang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengelolaan BUMDes sehingga tidak optimal.
3. Untuk mengetahui strategi apa yang diterapkan untuk pengoptimalan pengelolaan BUMDes

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dibidang ekonomi, khususnya jurusan akuntansi.

2. Manfaat praktis. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan acuan teknisi kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat desa tentang implementasi pengalokasian dana desa sebagai BUMDes.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara etimologis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari beberapa kata, yaitu Badan Usaha yudikatif (berbadan hukum), badan teknis dan ekonomi yang mencari laba atau keuntungan, dan kepemilikan dapat diartikan sebagai kepunyaan sementara, dan satu kesatuan wilayah yang dihuni banyak keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri (KBBI). Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh suatu sistem pemerintahan di mana suatu undang-undang secara teknis mencakup bidang sosial ekonomi.

BUMDes dibangun atas inisiatif dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwakilan dan partisipasi seluruh masyarakat desa, sehingga tidak tercipta model bisnis yang mendominasi di tingkat desa oleh kelompok tertentu.

Menurut (Maryunani, 2008), “BUMDes adalah organisasi usaha pedesaan yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah dan masyarakat desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik dengan cara mengembangkan potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia BUMDes pun dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Keberadaan BUMDes secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat dengan adanya BUMDes, desa diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable agar BUMDes dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi dan konsumen.

Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi social ekonomi BUMDes harus mampu berkompetensi keluar desa serta harus berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dari segi prokduktif maupun konsumtif dengan jasa pengiriman untuk penyediaan barang dan jasa dapat dicapai dalam pengadaan jasa masyarakat Persyaratan tersebut tidak terlalu memberatkan, seperti lebih murah, lebih mudah diperoleh dan harga yang lebih menguntungkan, namun dalam hal ini BUMDes harus tetap fokus pada efisiensi dan efektivitas kegiatan sektor fisik, dengan lembaga keuangan bertindak sebagai lembaga keuangan mikro.

Menurut Purnomo (2004) maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

1. Menumbuhkembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

- 1) Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- 2) Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
- 3) Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- 4) Meningkatkan kreatifitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Secara umum BUMD dan lembaga ekonomi komersial memiliki 7 (tujuh) ciri utama, yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui pertanyaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (lokal wisdom).

4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes, sebagai lembaga ekonomi modal komersial, berlandaskan prakarsa masyarakat dan menganut asas kemandirian. Artinya kinerja modal komersial BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Usaha desa dikembangkan bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan berpartisipasi langsung di masyarakat diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang membentuk badan usaha menerima dana pemerintah. Sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan tersendiri.

Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada anggaran rumah tangga yang disepakati pada awal pendirian BUMDes. Selain itu sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes diantaranya:

- a. Niat asli BUMDes sudah jelas. Sasaran tersebut dicapai dengan melayani kebutuhan bisnis produktif (terutama bagi masyarakat miskin

di pedesaan), mengurangi praktik hijau (jaminan) dan mengeluarkan uang, menciptakan pemerataan peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- b. Dalam pengelolaan BUMDes diharapkan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak dipengaruhi oleh masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat (daerah) yang lebih besar. Oleh karena itu, pendirian BUMDes yang diprakarsai oleh masyarakat harus tetap memperhatikan apakah terdapat potensi ekonomi yang dapat mendukung pembayaran pajak desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes perlu disebutkan atau diartikulasikan agar pemerintah desa, anggota (co-kapitalis), BPD, pemerintah kabupaten, dan masyarakat dapat memahami dan menulis dengan cara yang sama. Ada 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu:

- a) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bekerja sama dan dapat berkolaborasi dengan baik untuk mendorong perkembangan dan kelangsungan bisnis.

- b) Partisipasi, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMdes harus memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela atau dibutuhkan untuk mendorong perkembangan bisnis BUMDes.

- c) Liberal, seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama, tanpa memandang kelas, ras, dan agama.

- d) Transparansi, kegiatan yang mempengaruhi kepentingan publik harus dengan mudah dan terbuka dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

e) Akuntabel, semua aktivitas bisnis harus dipertanggungjawabkan dari segi teknologi dan manajemen.

f) Sustainable, Masyarakat harus mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha yang berkelanjutan di forum BUMDes.

Selain prinsip pemberdayaan dan desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMD juga harus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Azas kesukarelaan, artinya seseorang harus ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan BUMDes, tanpa dipaksa, tetapi harus dilandasi keinginan sendiri dan dimotivasi dengan cara memecahkan serta menyelesaikan permasalahan kehidupan yang dirusaknya.
2. Asas kesetaraan artinya semua pihak yang ikut serta dalam BUMDe memiliki status dan posisi yang sama dan setara.
3. Azas Musyawarah, artinya semua pihak memiliki hak untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya dan saling menghormati perbedaan pendapat. Saat mengambil keputusan, harus dilakukan musyawarah untuk mufakat.
4. Azas terbuka, dalam hal ini segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mengedepankan rasa saling percaya, kejujuran dan saling peduli.

2.1.2. Unit Usaha BUMDes

Usaha-usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDse antara lain: pasar pedesaan, transportasi, industri rumah tangga, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, obyek wisata pedesaan, kerajinan rakyat, peternakan, dan

Agroindustri. Fungsi BUMDes dapat disesuaikan dengan berbagai bisnis yang dikembangkan di pedesaan. Karenanya, BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit bisnis yang berbeda. Hal tersebut terlihat pada contoh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) departemen bisnis yaitu departemen perdagangan, departemen jasa keuangan dan departemen produksi. Secara umum departemen bisnis di BUMDes dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sektor jasa keuangan menjalankan usaha simpan pinjam.
- b. Bidang usaha real estate / ekonomi, seperti usaha warung, fotokopi, sablon, industri rumah tangga, pengelolaan taman wisata pedesaan, peternakan, perikanan, pertanian, dll.

2.1.3. Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa

Sebagai agen pembangunan pedesaan yang potensial, BUMDes diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi baru di pedesaan. UU No. 6 Juni 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa kepada BUMDes sebagai pelaku ekonomi secara bersama-sama mengelola potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Intinya, Resolusi Nomor 6 Tahun 2014 menggerakkan dan mendorong desa untuk memberikan pelayanan desa kepada masyarakat dengan tema pembangunan. Keberadaan BUMDes menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, Artinya sebagai proyek pembangunan desa, yang dapat berjalan dengan percaya diri dan berhasil mengelola rumah tangga sendiri serta menciptakan desa mandiri, yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa pemerintah.

Untuk mengetahui seberapa jauh BUMDes berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, beberapa indikator kemajuan ekonomi yang harus diperhatikan. Daerah dapat dikatakan maju atau tidak, ditinjau dari keadaan ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dapat dilihat dari parameter-parameter berikut :

- a. Pendapatan per kapita
- b. Tingkat Pertumbuhan ekonomi
- c. Kegiatan perekonomian utama
- d. Ketersediaan modal
- e. Pemanfaatan SDA
- f. Pertumbuhan penduduk
- g. Kepadatan penduduk
- h. Tingkat pengangguran
- i. Keadaan social budaya
- j. Kemajuan teknologi

2.1.4. Optimalisasi Pengelolaan

Siringoringo (2005: 4) mengemukakan bahwa optimalisasi adalah proses menemukan solusi yang terbaik, jika tujuan optimalisasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai. Atau jika tujuan pengoptimalan adalah untuk meminimalkan biaya, tidak selalu biaya terkecil yang dapat dikurangi. Dalam hal pengelolaan BUMDes, optimalisasi tentunya didasarkan pada pemaksimalan manfaat yang bisa dicapai. Ada beberapa elemen yang perlu diidentifikasi sebagai masalah

optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang terbatas.

Ketiga elemen tersebut sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan dapat berupa pemaksimalan atau minimalisasi. Jika tujuan pengoptimalan terkait dengan keuntungan, pendapatan, dll. Jika sasaran pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak, dll., Bentuk yang Di pilih adalah minimasi.

b. Keputusan alternatif

Keputusan harus dibuat atas keputusan lain yang diberikan. Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan mereka. Tentu saja, alternatif pengambilan keputusan yang tersedia adalah alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pembuat keputusan. Keputusan alternatif adalah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

c. Sumber daya Manusia

Membatasi sumber daya Manusia adalah pengorbanan atau tenaga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan perlunya optimalisasi proses, sumber daya disini berupa tenaga kerja yang diperuntukkan dalam hal pengelolaan.

Pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, memimpin, mengatur dan mengendalikan informasi manusia, material, keuangan dan sumber daya untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan yaitu proses penyelenggaraan kegiatan yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan keberhasilan, sebagai bentuk kesepakatan

untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan fungsi pengelolaan dapat disimpulkan bahwa tahapan berikut yang termasuk dalam proses pengelolaan, yaitu :

A. Perencanaan (Planning) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, rencana menempati posisi yang sangat penting guna merumuskan strategi yang akan ditempuh selama pelaksanaan kegiatan. Rencana adalah kegiatan yang tujuannya menetapkan tujuan yang ingin dicapai, hal-hal yang akan dilakukan dan yang akan melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Organisasi (organization) mengartikan kegiatannya untuk merancang dan mengatur kegiatan agar segala sesuatunya berjalan sesuai prosedur, sehingga semua kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Organisasi mempersiapkan struktur organisasi dan kelompok peserta serta tanggung jawab sehingga organisasi dapat berusaha keras untuk mencapai tujuannya.

C. Pelaksanaan (actuating) manajer atau pimpinan akan berusaha keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengaktifkan elemen bawahannya agar mau bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh.

D. Evaluasi adalah proses yang menggunakan sekumpulan hasil pengukuran dan mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan mengevaluasi, mengukur, dan membandingkan hasil kinerja dengan standar yang ditetapkan dalam rencana, baik sesuai, atau mungkin menyimpang.

2.1.5. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes diperlukan pengelolaan yang baik dengan memenuhi prinsip pengelolaannya. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memahami dan

memahami komponen BUMDes (yaitu pemerintah desa, pengurus, BPD, pemerintah kabupaten dan masyarakat). Menurut PKDSP dalam Kamaroesid (2016: 20), terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMD, yaitu:

a. kooperatif

Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus dapat berkolaborasi dengan baik untuk mendorong perkembangan dan kelangsungan bisnisnya. BUMDes di Kecamatan Kaidipang Desa Pontak melibatkan berbagai komponen yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten, melalui Kecamatan yang harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan BUMDes.

b. Partisipatif

Seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela atau diperlukan untuk mendorong perkembangan bisnis BUMDes. BUMDes di Kecamatan Kaidipang di Desa Pontak melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten yang melalui kecamatan tersebut. Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan BUMDes harus bisa saling mendukung.

c. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes, apapun golongan, ras, atau agamanya, harus diperlakukan sama. BUMDes di Kecamatan Kaidipang di Desa Pontak melibatkan banyak komponen yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten melalui kabupaten. Terlepas dari latar belakang komponen tersebut, mereka harus mendapat perlakuan yang sama.

d. Transparan

Kegiatan yang mempengaruhi kepentingan umum harus dengan mudah dan diketahui oleh semua sektor masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMDes harus bersedia memberikan informasi tentang BUMDes, dan tidak sulit untuk memperoleh informasi tersebut, oleh karena itu desa harus menyediakan sistem informasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.

e. **Sustainabel**

Kegiatan komersial harus dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat dalam forum BUMDes. Agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis, BUMDes harus terus berinovasi dan menjaga kualitas bisnis dengan pendampingan seluruh komponen BUMDes. Hal ini terkait dengan perkembangan omset, laba rugi, status produk / jasa, sistem pelayanan, pekerjaan promosi, lokasi dan perluasan usaha BUMDes.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nana Mulyana, Anisa utami dan Simon Sumanjoyo Hutagalung	Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan	Hasil penelitian ini adalah peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Kecamatan (BUMDes) di Desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan terlihat bahwa rata-rata pemahaman peserta mengalami peningkatan sebesar 28,37%.
Ni Luh Putu A. D. P., Made A. W.,	Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Optimalisasi Peran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penguatan pengelolaan

<p>dan Made A. P., (2017)</p>	<p>BUMDes untuk Kemandirian Desa Pada Desa Di Kabupaten Jembrana</p>	<p>keuangan tingkat desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa; (2) Optimalisasi peran BUMDes berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemandirian desa. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode kualitatif</p>
<p>Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, F., dan Jaka Winarna Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 16, tahun 2016</p>	<p>Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. Pada Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu terdapat lima unit usaha pada BUMDes tersebut dan terdapat kendala yang terjadi atau dalam artian peran BUMDes disini belum dapat optimal sehingga penulis memberikan solusi berupa strategi pelatihan yaitu dari perencanaan, pemrograman, dan penganggaran, implementasi, serta pendampingan.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, maka yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang. Alasan peneliti mengambil lokasi ini sebagai lokasi penelitian yaitu karena lokasinya ada Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Evaluasi Hasil Analisis adalah desa peneliti sendiri sehingga memudahkan peneliti mengakses informasi terkait BUMDes yang akan membantu peneliti dalam menyusun hasil penelitian.

3.2. Desain Penelitian dan Jenis Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Rokhmat Subagiyo, penelitian kualitatif disebut juga penelitian alami. Penelitian ini menitikberatkan pada proses dan makna yang belum teruji atau terukur secara akurat, tetapi dilakukan dalam bentuk data deskriptif yang akan dilanjutkan dalam bentuk naratif Describe. Pada penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan dari fenomena yang terjadi di lapangan.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis terkait permasalahan yang diteliti yaitu mengenai faktor penghambat pengoptimalisasian BUMDes serta upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan BUMDes di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang.

3.2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya sesuai keadaan yang ada, sehingga dapat membantu dalam memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka Kompilasi teori baru. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode deskriptif yang menggambarkan keadaan suatu objek, kondisi atau lingkungan tertentu yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis masalah atau fenomena yang terjadi pada sistem. Dengan kata lain, penelitian ini hanya mendeskripsikan fenomena penelitian, karena berupa data tertulis, perilaku atau lisan dari sumber data tanpa adanya uji hubungan variabel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan yang ditelitidari para informan yaitu kepengurusan atau pemangku kepentingan dalam BUMDes Desa Pontak serta masyarakat yang aktif dalam kegiatan usaha BUMDes Desa Pontak.

3.3. Operasional Variabel

Pengukuran optimalisasi pengelolaan BUMDes di Desa Pontrak, penulis menggunakan teori pengukuran dari Siringoringo (2005: 4) yaitu tujuan, keputusan alternatif, dan sumber daya manusia yang deikian ini pula menjadi operasional variabel dalam penelitian ini

a. Tujuan

Tujuan dapat berupa pemaksimalan atau minimalisasi. Jika tujuan pengoptimalan terkait dengan keuntungan, pendapatan, dll. Jika sasaran pengoptimalan terkait dengan biaya, waktu, jarak, dll., Bentuk yang Di pilih adalah minimasi.

b. Keputusan alternatif

Keputusan harus dibuat atas keputusan lain yang diberikan. Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan mereka. Tentu saja, alternatif pengambilan keputusan yang tersedia adalah alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pembuat keputusan. Keputusan alternatif adalah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

c. Sumber daya Manusia

Membatasi sumber daya Manusia adalah pengorbanan atau tenaga yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan perlunya optimalisasi proses, sumber daya disini berupa tenaga kerja yang diperuntukkan dalam hal pengelolaan.

3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana peneliti memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data mentah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber data aslinya. Sumber data asli adalah sumber yang dapat memberikan

informasi secara langsung, dan hubungan antara sumber data tersebut dengan pertanyaan penelitian utama berkaitan dengan informasi yang dicari. Oleh karena itu, data utama penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian oleh peneliti baik berupa subjek (orang) secara individu maupun 25 kelompok. Pengumpulan data mentah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara (interview) dan metode observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara (interview) sebagai data utama untuk memperoleh data dari informan. Para pihak yang dijadikan informan penelitian antara lain aparat desa Pontak, pengurus dan anggota BUMDes, serta warga yang aktif mengelola bisnis BUMDes Desa Pontak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri atau bukan didapatkan oleh peneliti sendiri meskipun data tersebut data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, majalah, internet, maupun dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas yaitu terkait optimalisasi peran BUMDes dalam pengembangan potensi ekonomi lokal.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi dari hasil penelitian antara penanya dan narasumber (pemberi jawaban) dengan cara bertanya dan

menjawab. Dalam hal ini teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti tidak terstruktur dan fleksibel, teknik wawancara dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan kondisi yang dihadapi atau situasi yang diwawancarai dalam pertanyaan. Selama proses implementasi, peneliti akan langsung mewawancarai pihak terkait dan relevansinya dengan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan narasumber yang bersangkutan dengan BUMDes Desa Pontak dan diyakini peneliti akan memberikan informasi yang valid atau akurat. Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada ketua BUMDes Desa Pontak, kepengurusan yang lain, serta masyarakat yang bergabung dalam kegiatan usaha BUMDes desa Pontak.

2. Observasi

Penelitian kualitatif observasional diilustrasikan dalam tiga cara. Pertama, pengamat bisa berperan sebagai partisipan atau non partisipan. Kedua, observasi bisa dilakukan secara terbuka atau diam-diam. Ketiga, mengenai observasi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini teknik observasi pertama digunakan dengan pengamat yang berperan sebagai partisipan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengabadikan setiap momen penelitian yang dilakukan sebagai bukti penelitian. Dimulai dari dokumentasi pada survey langsung, serta pada saat wawancara berlangsung untuk menunjang hasil penelitian agar valid dan reliabel juga dapat diuji keabsahannya.

3.6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, bahkan setelah data terkumpul. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam

menyajikan, dan menyimpulkan data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendeskripsikan fakta-fakta tertentu secara sistematis dan akurat.

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16), analisis data dibagi menjadi tiga tahap:

1. Reduksi Dat, Tahap penyiapan data berarti meringkas, memilih konten utama, memfokuskan pada konten penting, mencari tema dan pola, serta menghapus tema dan pola yang tidak perlu. Oleh karena itu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pengurangan data difokuskan pada bagaimana BUMDes mengadopsi optimalisasi untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal Desa Pontak sebagai tulang punggung perekonomian desa.

2. Paparan Data paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini paparan data akan menguraikan permasalahan yang dibahas yaitu tentang optimalisasi yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan potensi ekonomi local desa Pontak.

3. Penarikan Kesimpulan merupakan jawaban atas focus penelitian berdasarkan analisis data. Tahap penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data terhadap optimalisasi yang dilakukan BUMDes dalam pengembangan potensi ekonomi local desa Pontak, berupa temuan tentang seberapa pentingnya optimalisasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pontak.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Pontak

Berdasarkan hasil kajian sejarah bahwa Desa Pontak pertama-tama adalah berstatus pendukuhan Duongi dan Soligir yang dipimpin oleh Bantong Laroah Bolota dan Gumohung, kemudian pada tahun 1913 Raja R. S. Pontoh melaksanakan perjalanan ke Manado untuk melihat kemajuan dan perkembangan Manado (studi banding) ditengah perjalanan Raja R. S. Pontoh berada disuatu tempat yang datarannya luas serta mempunyai banyak buah-buahan durian setelah ditanya apa nama dari wilayah tersebut pembimbing mengatakan bahwa wilayah itu bernama Pontak dan pada saat itu terbetiklah dalam hati sang Raja apabila pulang ke Kaidipang akan mencari wilayah yang sama dan akan dinamakan Pontak. Dan setelah pulang dari perjalanan Raja. R. S. Pontoh langsung datang ke Pendukuhan Duongi dan Soligir dan menggabungkan dua pendukuhan itu menjadi satu dan dinamakan satu Desa yakni Desa Pontak dan pada saat itu resmilah Desa Pontak menjadi satu desa yang dipimpin oleh seorang Sangadi yang bernama Pouse Pontoh pada tahun 1913 (Profil Desa Pontak:2020).

Selengkapnya pejabat Sangadi Desa Pontak dari Tahun 1913 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

Tabel 4.1

NO	NAMA SANGADI	TAHUN MEMERINTAH
1	Pouse Pontoh	
2	May Habibu	
3	May Andaru	
4	Doni May Sara	
5	D. Korompot	
6	Tuan Moukit	
7	Doni Sai Sitikala	
8	M. Mokodompis	
9	B. Babay	
10	Wakat Babay	
11	May Laga	
12	M. Mokodompis	
13	Rupina Buhang	
14	M. Mokodompis	
15	Rupina Buhang	
16	Nawas Pontoh	1965
17	Noho Rahman	1966 – 1972
18	Yusuf Pontoh	1973 – 1985
19	Djamil Buhang	1986 – 1997
20	Abd. Wahab Buhang	1997 – 2001
21	Suldin A. Babay	2003 – 2008
22	Sidhal Kamaru	2009 – 2014
23	Sulaiman Pontoh	2015 – 2020
24	Zainudin Bolota, S.AP	2020

Sumber data : Profil Desa pontak Tahun 2020

4.1.2 Aspek Geografi dan Demografi

a. Kondisi Umum

Desa Pontak merupakan salah satu Desa dari 15 Desa yang berada di Kecamatan Kaidipang secara geografi Desa Pontak berada diwilayah daratan/hamparan yang dikelilingi perkebunan dan persawahan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut, berikut ini :

- a. Sebelah Utara : Desa Kuala
- b. Sebelah Timur : Desa Soligir
- c. Sebelah Selatan : Desa Gihang
- d. Sebelah Barat : Desa Bigo Selatan

b. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Desa Pontak adalah 790 Ha, luas wilayah saat ini mengalami penurunan dikarenakan pada Tahun 2013 Desa Pontak kembali dimekarkan mejadi dua Desa yakni Desa Pontak yang merupakan Desa induk dan Desa Gihang yang mejadi desa otonom baru di Kecamatan Kaidipang. Dan untuk pembagian wilayah Administrasi Desa Pontak menjadi tiga dusun (Profil Desa Pontak:2020).

c. Jumlah Penduduk per Dusun

Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berada di Dusun I, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun III. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

NO	DUSUN	JUMLAH PENDUDUK	
		2019	2020
1	DUSUN I	272	
2	DUSUN II	265	
3	DUSUN III	215	
	JUMLAH	752	752

Sumber data : Profil Desa Pontak Tahun 2020

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator yang mampuh menopang perkembangan pembangunan dan pemerintahan Desa Pontak. Berdasarkan data tingkat pendidikan di Desa Pontak,

terbanyak pada tamatan SD atau sederajat kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD, SLTP atau sederajat, tamatan SLTA atau sederajat, dan terakhir Akademi/diploma, S1 dan S2. Secara keseluruhan latar belakang pendidikan masyarakat Desa Pontak sebagai berikut;

Tabel 4.3

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana
274	150	157	125	3	15

Sumber data : Profil Desa Pontak Tahun 2015

e. Jenis Pekerjaan

Desa Pontak merupakan Desa Agraris yang sebagian besar Penduduknya adalah Petani, kemudian diikuti jenis pekerjaan Tukang, Pedagang dan Pegawai Negeri Sipil. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 17 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Pontak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dominan pada jenis mata pencaharian petani.

Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 17 tahun keatas di Desa Pontak, sebagaimana tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4

Petani	Pedagang	Nelayan	PNS	Tukang	Lainlain
295	10	0	10	20	-

Sumber data : Profil Desa Pontak Tahun 2015

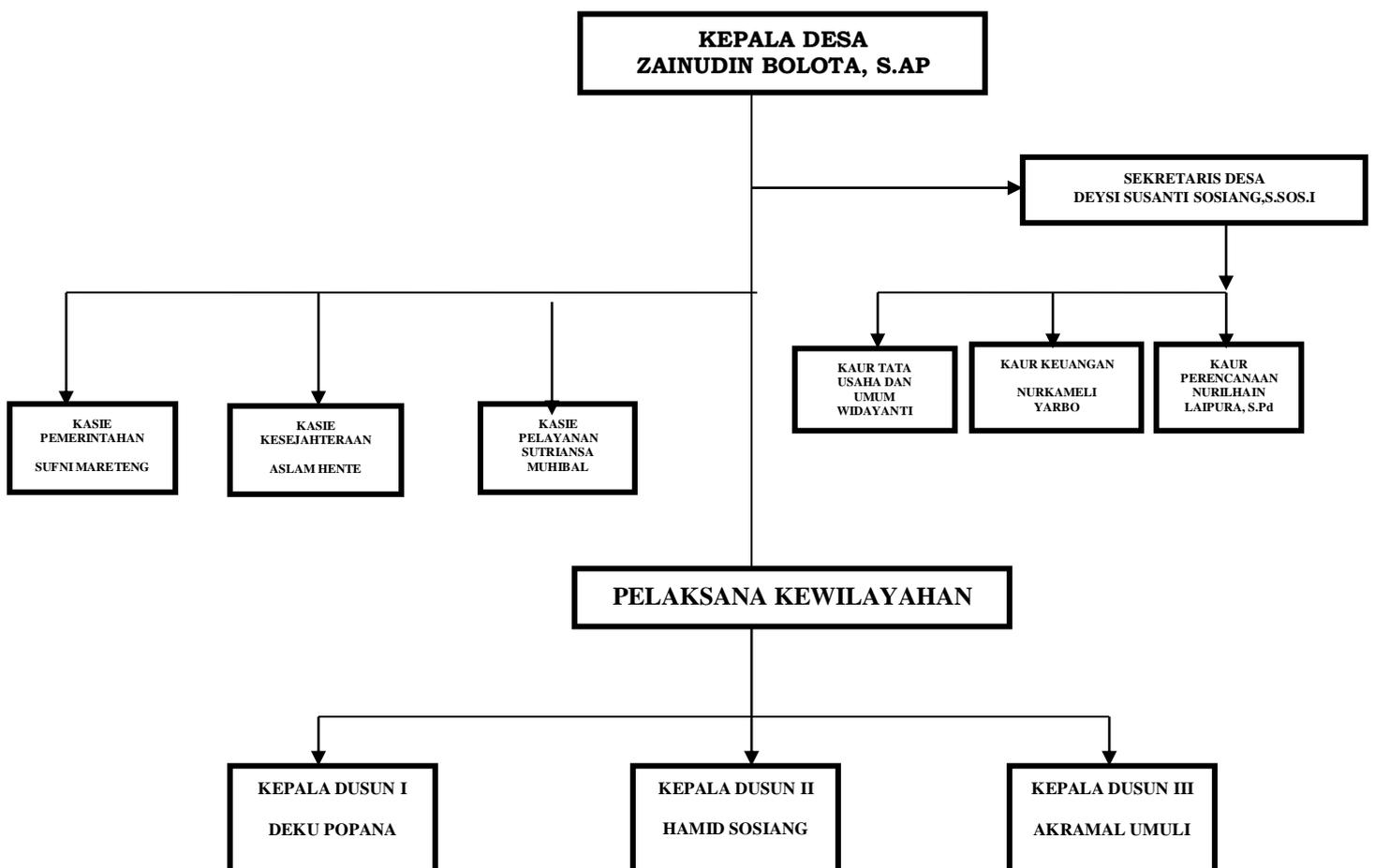
f. Sumber daya Alam

Kondisi topografi, Desa Pontak memiliki relief daerah dataran. Desa Pontak merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor

pertanian. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah Padi, Jagung, Kacang Hijau, Kedelai dan tanaman Palawija lainnya.

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Pontak pada musim kemarau disebagian wilayah terjadi kekeringan yang cukup berpengaruh pada kondisi tanam masyarakat (Profil Desa Pontak: 2020)

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



4.1.4 Visi-Misi Desa Pontak

A. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Pontak saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Pontak pada periode 6 (Enam) tahun ke depan (tahun 2016-2021), disusun visi sebagai berikut : “Mewujudkan Desa Pontak Yang Mandiri, Berbudaya, Terpercaya Dalam Membangun Desa Untuk Menunjang Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat .” maksud dari visi tersebut ialah:

1. Desa yang Mandiri, Berbudaya mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Pontak mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada budaya dan kearifan lokal.
2. Adapun yang dimaksud Terpercaya Dalam Membangun Desa adalah masyarakat yang sadar akan setiap pembangunan yang telah dilaksanakan adalah milik masyarakat bersama demi kepentingan bersama untuk itu perlunya pelestarian asset asset Desa disamping itu Transparansi dan Akuntabel dalam membangun desa, berperan secara partisipatif dalam perencanaan pembangunan yang berjenjang dan berkesinambungan.
3. Menunjang Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan suatu misi yang

terkonsep rapi demi menunjang keberhasilan akan capaiain visi tersebut. Oleh krena itu, misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pontak.

4.1.5 Gambaran Umum BUMDes Pontak

a. Organisasi

Usaha meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah desa telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa Pontak sejak tahun 2017.

Tugas dan tanggung jawab pengurus Badan Usaha Milik Desa ini ialah melaksanakan kegiatan uasa dan unit-unit usaha serta melaporkan kemajuan perkembangan kepada pemerintah desa.

b. Struktur Kepengurusan

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 10 dijelaskan bahwa organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisai pemerintahan desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari: 1) Penasehat, 2) Pelaksana Operasional, 3) Pengawas.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh maysarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Meteri tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa Pontak sudah ada, yakni:

NO	NAMA	JABATAN
1	Zainudin Bolota, S.AP	Penasehat/ Sangadi
2	Mohamad Bolota	Direktur/Ketua
3	Zainal Buhang	Sekretaris
4	Suratni Umaili	Bendahara
5	JefriPopana Djafar Huning Fadli Hente	Koordinator unit usaha pertanian Bidang ADM unit usaha pertanian kios saprodi Anggota unit usaha pertanian
6	Suleman Korompot Mustafa Abdulah Lisman Buheli Ridwan Sumaila Asrin Kamaru	Koordinator unit usaha peternakan Bidang ADM unit usaha peternakan Anggota unit usaha peternakan

Badan Pengawas:

NO	NAMA	JABATAN
1	Suldin A. Babay	Ketua Badan Pengawas
2	Ujaini Bolota	Wakil Ketua Badan Pengawas
3	Darwin Dunggio	Sekretaris Badan Pengawas
4	Aslan Hente	Anggota Badan Pengawas
5	Rostin Hente	Anggota badan Pengawas

Adapun tugas dan fungsi masing-masing struktur ialah:

1. Pengawas, adapun tugas pengawas yakni untuk mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMDes.
2. Penasehat, tugas dari penasehat yakni sebagai Pembina dalam menjalankan dan mengoperasikan BUMDes.
3. Direktur, mempunyai tugas menjalankan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:
 - a) Memimpin organisasi BUMDes
 - b) Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
 - c) Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
 - d) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa
 - e) Mengkoordinir seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar
 - f) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan

- g) Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui musyawarah desa
 - h) Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun melalui musyawarah dan pertanggungjawaban
4. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi BUMdes, diantaranya:
- a) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
 - b) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
 - c) Melaksanakan administrasi pembkuan keuangan BUMDes
 - d) Menyusun administrasi pengawasan dan pngendalian pelaksana tugas pengelola unit usaha BUMDes
 - e) Mengelola surat menyurat secara umum
 - f) Melaksanakan kearsipan
 - g) Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes
5. Bendahara, mempunya tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes, diantaranya:
- a) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
 - b) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMdes
 - c) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMdes
 - d) Mengelola gaji dan insentif pengurus BUMDes
 - e) Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes

- f) Pengelola keuangan penerimaan unit usaha BUMDes
 - g) Melaporkan posisi keuangan kepada direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
 - h) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
 - i) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
6. Pengelola Unit Usaha, bertugas membantu direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.
- a) Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab kepada direktur
 - b) Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan unitnya
 - c) Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan-kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
 - d) Melaporkan posisi keuangan kepada direktur dan bendahara
 - e) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait
 - c. Jenis-Jenis Usaha BUMDes Pontak, meliputi bidang-bidang:
 - 1. pertenakan
 - 2. pertanian (kios saprodi)

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Optimalisasi Pengelolaan Bumdes Pada Desa Pontak Kecamatan Kaidipang

Agar dapat mengetahui optimalisasi pengelolaan BUMDes di Desa Pontak, maka penulis menggunakan teori dari Siringoringo (2005: 4) yaitu tujuan, keputusan alternatif, dan sumber daya manusia.

a. Tujuan

Adanya tujuan atau dengan ditetapkannya tujuan adalah hal yang penting dalam mengoptimalkan pengelolaan sebab hal ini merupakan langkah awal dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai (Prajudi Atmosudirdjo 2012:3).

Keberadaan BUMDes Pontak ini diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi kemiskinan dan menunjang perekonomian. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bapak Zainudin Bolota selaku Kepala Desa Pontak:

“Dengan adanya BUMDes ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di bidang-bidang unit usahanya, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala namun harapan kami akan peningkatan perekonomian melalui kegiatan-kegiatan di unit usaha BUMDes sangatlah besar” (29 Maret 2021).

Terkait tujuan BUMdes itu sendiri, pada umumnya tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa ialah:

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Pontak dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa Pontak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- b. pengembangan potensi perekonomian di wilayah desa Pontak untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Pontak secara keseluruhan.

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes
- d. menciptakan lapangan kerja

Singkatnya, tujuan BUMDesa ialah untuk mengembangkan ekonomi suatu desa. BUMDes merupakan badan usaha yang memiliki fungsi mengoptimalkan potensi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Zainudin Bolota selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Terbentuknya BUMDes diharapkan sebagai usaha menjadikan Desa Pontak sebagai desa mandiri secara finansial, sehingga membantu permodalan usaha masyarakat. Hadirnya BUMDes diharapkan dapat menjadi wadah bagi badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat agar lebih optimal pemasarannya.”(29 Maret 2021)

Secara langsung, tergambar dari pernyataan tersebut bahwa tujuan dari diadakannya BUMDes Pontak ini ialah agar bisa membantu masyarakat secara keseluruhan serta meningkatkan perekonomian desa. Hal ini pula diungkapkan oleh Ibu Suratni Umuli selaku Bendahara BUMDes Pontak, yakni:

“Tujuan BUMDes Pontak didirikan ialah untuk membantu perekonomian desa dan membantu perekonomian masyarakat setempat melalui program-program usahanya” (29 Maret 2021)

Program Badan Usaha Milik Desa yang baik harus dirasakan oleh masyarakat tentunya. Program-program tersebut haruslah sesuai dengan kondisi masyarakat, harus sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya, serta sesuai dengan potensi yang ada di desa sehingga program yang dibuat nantinya tidak akan sia-sia. Setiap unit-unit usaha yang dibentuk, harusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pontak serta memberikan peluang bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Unit usaha yang didirikan oleh Desa Pontak ada dua, yakni di bidang peternakan dan pertanian. Dari kedua usaha tersebut, satu diantaranya yakni peternakan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan sisanya di bidang pertanian berupa usaha kios saprodi masih beroperasi hanya saja tidak maksimal pengelolaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, usaha kios saprodi yang dijalankan tidak berkembang dan tidak memiliki keuntungan. Hasil penjualan yang ada hanya bisa digunakan untuk perputaran modal, sama sekali tidak ada pemasukan ke desa. Terlebih lagi dibidang peternakan, usaha dibidang ini dapat dikatakan gagal total sebab tidak ada yang dihasilkan bahkan sekarang usaha ini sudah tidak berjalan lagi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Suratni Umuli selaku Bendahara BUMDes Pontak:

“Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes Pontak, sehingga dari dua bidang usaha yang didirikan, satu diantaranya sudah tidak berjalan lagi, yang berjalan saat ini hanya usaha kios saprodi, namun sampai saat ini tidak ada setoran ke desa, sebab hasilnya hanya cukup untuk pemutaran ulang”(29 Maret 2021)

Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Nurkameli Yarbo selaku kaur keuangan

Desa Pontak:

“Hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri, belum ada pemasukan dari hasil Badan Usaha Milik Desa yang didirikan. Belum ada fasilitas desa atau kebutuhan desa yang didanai dari hasil BUMDes, tentunya hal ini perlu perbaikan dari pengurus BUMDes serta kami pemerintah desa” (1 April 2021).

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat jelas bahwa tujuan didirikannya BUMDes pontak yakni membantu perekonomian desa dan masyarakat belum tercapai. Sebab, tiga usaha yang didirikan tidak menuai keuntungan justru malah mengalami kerugian. unit usaha di bidang peternakan tidak lagi beroperasi,

sedangkan usaha kios saprodi di bidang pertanian masih beroperasi namun tidak memiliki keuntungan. Hasil yang didapat hanya untuk perputaran kembali modal sehingga tidak ada dana yang bisa digunakan untuk membantu mengembangkan perekonomian desa dan masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan BUMDes tersebut yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah setempat dan pengurus BUMDes.

b. Pengambilan Keputusan Alternatif

Pengambilan keputusan sejak awal telah dipraktikkan oleh pemerintah Desa Pontak dan pengurus BUMDes Pontak. Terdapat banyak alternatif atau pilihan terkait unit usaha yang berpeluang dibuka, namun pemerintah Desa Pontak menjatuhkan pilihan pada bidang peternakan dan pertanian.

Unit usaha dibidang pertanian didasarkan pada Desa Pontak merupakan desa agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Unit usaha yang didirikan dibidang pertanian ini ialah usaha kios saprodi. Usaha ini menyediakan sarana produksi seperti pupuk, benih/bibit, dan obat-obatan yang merupakan syarat pokok dalam suksesnya usaha pertanian. Fungsi kios saprodi dalam hal ini tidak hanya untuk menyediakan berbagai keperluan para petani, tetapi yang paling penting adalah kualitas dan harga yang ditawarkan dapat dijangkau petani. Disamping itu, warga yang sedang mengalami kesulitan pendanaan usahapun bisa mengupayakan pinjaman dari unit usaha ini, dengan catatan pinjaman tersebut harus dikembalikan.

Pengambilan keputusan menjalankan Unit usaha dibidang pertanian ini disertai dengan upaya atas kelancaran unit usaha tersebut, hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan tersebut dapat berjalan menuju tujuan awal yakni dapat

membantu serta menopang usaha-usaha masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Deysi Susanti Sosiang Sekretaris Desa Pontak:

“BUMDes Pontak sengaja mengambil keputusan menjalankan unit usaha dibidang pertanian dan mengupayakan kelancaran unit usaha dibidang tersebut, karena mengingat sebgain besar penduduk Desa Pontak bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab itu unit usaha dibidang ini diharapkan dapat membantu menopang usaha masyarakat tersebut. Alasan ini menjadi dasar utama pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha ini” (1 April 2021)

Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas, sedari awal keputusan menjalankan usaha dibidang pertanian ini diajukan demi menopang usaha masyarakat setempat sebab sebagian besar penduduk desa Pontak bekerja sebagai petani dan sisanya adalah tukang, pedagang dan pegawai. Terlebih lagi penduduk usia kerja di Desa Pontak adalah penduduk pada usia 27 tahun keatas, dengan didukung oleh kondisi desa yang merupakan desa agraris maka bukan hanya laki-laki, namun perempuanpun turut serta terjun dalam dunia pertanian.

Keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk menjalankan usaha ini sangat tepat, karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa Pontak. Namun, amat sangat disayangkan pengelolaan unit usaha ini masih berkendala sehingga perputaran modal belum bisa menghasilkan keuntungan untum membantu pembangunan atau keperluan desa. Usaha ini semacam jalan ditempat karena tidak ada kemajuan dan tidak ada untuk yang dapat diambil. Hasil penjualan hanya diperuntukkan perputaran modal ulang. Tidak dapat digunakan untuk membantu menunjang perekonomian desa sebagaimana tujuan awal didirikannya BUMDes. Kondisi seperti ini mengharuskan pengurus BUMDes agar dapat membuat keputusan alternatif lain

untuk menjaga jalannya usaha sesuai dengan tujuan awal yakni menunjang perekonomian desa dan masyarakat.

Unit usaha kedua yang dipilih oleh pengurus BUMDes Pontak adalah unit usaha dibidang peternakan. Keputusan pilihan ini didasarkan pada fakta lapangan bahwa, belum terdapat usaha yang berjalan dibidang peternakan dan masih sangat terhitung minim di skala Kecamatan Kaidipang. Hal ini memberikan asumsi bagi pengurus bahwa kelak akan sangat membantu dan berpenghasilan diatas rata-rata sebab usaha dibidang ini belum ada yang menjalankanny sehingga memberikan peluang besar bagi BUMDes untuk menjadi pelopor serta sandaran di bidang ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Deysi Susanti Sosiang selaku Sekretaris Desa Pontak:

“Unit usaha dibidang peternakan ini dipilih karena belum ada yang menjalankan usaha dibidang ini di Desa Pontak, oleh karena itu kami dan pengurus BUMdes berinisiatif untuk menjalankannya” (1 April 2021)

Unit usaha yang dijalankan dibidang ini ialah jual beli hewan ternak. Usaha ini dikhususkan untuk pemenuhan serta peningkatan ekonomi desa sebab objek jualnya berbeda dengan unit usha peternakan. Namun kenyataan dilapangan yang didapati adalah usaha dibidang ini hanya aktif di tahun pertama pelaksanaan BUMDes. Hingga kini usaha ini tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya bahkan dapat dikatakan macet total. Ketidak optimalan ini jelas sangat disayangkan oleh beberapa phak, mengingat unit usaha yang dibangun oleh BUMDes merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian desa dan membantu kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Zainudin Bolota selaku Kepala Desa Pontak:

“Tidak berjalannya unit usaha di bidang peternakan jelas amat sangat disayangkan, terlebih lagi belum ada upaya perbaikan akan masalah itu.

Hal ini jelas sekali menjadi PR besar bagi pengurus dan tentunya kami para pemerintah Desa”(29 Maret 2021).

Sejak 2018 hingga saat ini, belum ada alternatif keputusan yang diambil oleh para pengurus untuk mengupayakan pengoptimalan pengelolaan unit usaha ini. Beberapa alasan menjadi penyebab terkandasnya unit usaha dibidang peternakan ini, namun yang lebih disayangkan ialah sikap para pengurus yang sampai sekarang belum mengupayakan perbaikan atas masalah ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Suratni Umuli selaku Bendahara BUMDes Pontak:

“Usaha dibidang peternakan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Usaha dibidang ini hanya berjalan ditahun pertama pelaksanaan BUMDes namun dikarenakan beberapa hal usaha ini macet dan hingga sekarang belum ada upaya memperbaiki jalannya usaha dibidang peternakan” (29 Maret 2021).

Berdasarkan masalah tersebut, dapat terlihat jelas bahwa belum ada upaya pengambilan keputusan alternatif yang dibuat oleh para pengurus BUMDes dan Pemerintah Desa Pontak demi menjaga pelaksanaan BUMDes ini berjalan menuju tujuan awal yang ingin dicapai. Sesuai dengan paparan diatas, sedari awal dalam rangka pembentukan unit usaha, dari sekian banyak bidang usaha yang ada pengurus BUMDes Pontak mengambil keputusan menjalankan unit usaha dibidang pertanian dan peternakan. Hal inididasarkan pada beberapa alasan yang disesuaikan dengan kondisi desa sebagaimana apa yang dijelaskan diatas. Namun dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan unit usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal.kondisi ini mengharuskan pengurus BUMDes mengambil keputusan alternatif demi mempertahankan keaktifan dari unit usaha tersebut. Sayangnya hingga kini, belum ada keputusan alternatif yang diambil pengurus BUMDes dalam menangani masalah tersebut, sehingga BUMDes Pontak masih jauh dari kata optimal dalam pelaksanaany.,

Belum adanya upaya pengambilan keputusan alternatif demi mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam pengelolaan BUMDes, serta berdasarkan fakta lapangan yang ada, Pengelolaan BUMDes pada Indikator ini dapat dikatakan belum optimal.

Pengambilan keputusan dalam Pengoptimalan pengelolaan BUMDes dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi yang akan penulis bahas pada sub bab 4.2.3 terkait strategi yang diterapkan untuk pengoptimalan pengelolaan BUMDes Pontak.

c. Sumber Daya Manusia

Indikator terakhir dalam pengukuran optimalisasi pengelolaan BUMDes yakni sumber daya manusia. sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini ialah tenaga kerja yang bertugas mengelola BUMDes Pontak atau mereka yang termasuk dalam kepengurusan BUMDes Pontak serta segala pihak yang terkait.

Pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan BUMDes ini seyogyanya harus berkompeten dalam bidang yang dikelolanya. Keaktifan unit usaha bergantung pada kualitas SDM pengelola unit usaha tersebut. Sebagaimana penjelasan awal, terdapat unit usaha di dua bidang yakni pertanian dan peternakan. Kondisi unit usaha di kedua bidang tersebut secara jelas menggambarkan kualitas SDM pengelola BUMDes.

Tidak beroperasinya unit usaha di bidang peternakan pun membuktikan bahwa kurang optimalnya pekerjaan pengurus di bidang unit usaha peternakan. Setiap unit usaha yang didirikan seharusnya memberikan manfaat terlebih bagi masyarakat Desa Pontak, bahkan seharusnya dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, sehingga akan sangat disayangkan apabila unit

usaha ini tidak berjalan sebagaimana mestinya diakibatkan kurang optimalnya kerja pengurus.

Selain itu, unit usaha yang berjalan dibidang pertanian namun tidak dapat memberikan hasil, juga merupakan akibat dari kurangnya kinerja dari sumber daya manusia yang terkait. Hal ini sejalan dengan perkataan dari Ibu Suratni Umuli selaku Bendahara BUMDes Pontak:

“Tidak berjalannya unit usaha peternakan dan kurang optimalnya pengoprasian kios sapirodi dapat dikarenakan kurangnya pemahaman dari pengelola kios sapirodi itu sendiri sehingga penghasilan hanya bisa digunakan untuk perputaran kembali modal, tidak ada keuntunganyang masuk di desa untuk penunjang ekonomi desa. Disamping itu hal ini juga dipengaruhi oleh keaktifan dari para pengurus, tidak sedikit pengurus yang belum paham betul terkait besarnya tanggungjawab yang mereka pikul dan tidak sedikit pula pengurus yang salah kaprah atau salah pemahaman terkait pengelolaan BUMDes ini.” (29 Maret 2021).

Hal ini sejalan pula dengan fakta lapangan yang penulis temukan selama penelitian berlangsung, dimana yang turut aktif dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes hanya Ibu Sutratni Umaili seorang selaku bendahara BUMDes Pontak. Pengurus BUMDes yang lain amat sangat jarang bahkan hampir tidak pernah terlihat dalam pengelolaan BUMDes Pontak tersebut.

Selain itu, berdasarkan fakta lapangan yang penulis temukan bahwa tidak aktifnya pembukuan atau administrasi pengelolaan BUMDes ini, dimana pencatatan terkait administrasi BUMDes hanya sampai pada Tahun 2019, tahun setelahnya tidak ada pencatatan lagi. Hal ini jelas membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes ini jelas sangat membutuhkan perbaikan.

Tidak hanya pengelola, keaktifan SDM di bidang pengawasan juga sangat mempengaruhi jalannya BUMDes Pontak. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan,

menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pelaksanaan pengawasan seharusnya memiliki standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar dalam bidang pengawasan Badan Usaha Milik Desa Pontak ini berpanduan pada peraturan desa dan AD/ART BUMDes Pontak. Selain itu, penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan juga penting untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Desa Pontak. Berdasarkan fakta lapangan yang penulis temukan bahwa belum ada tindakan pengawasan yang dilakukan oleh para pengawas pelaksanaan BUMDes, sehingga belum ada bentuk perbaikan yang diajukan oleh badan pengawas atas mandetnya pengelolaan BUMDes Pontak ini.

Pelaksanaan tindakan perbaikan, pertama-tama harus menganalisis apa yang menyebabkan masalah dalam proses pengelolaan BUMDes ini. Tindakan perbaikan dapat diambil apabila sudah diketahui dengan pasti apa penyebab adanya masalah. Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya penempatan SDM berkualitas dan bertanggungjawab pada setiap aspek pengelola BUMDes, namun sayangnya, baik pengurus maupun badan pengawas belum menyadari betul terkaitnya besarnya tanggungjawab yang dipikul serta pentingnya keaktifan yang bersangkutan pada pengelolaan BUMDes. Hal ini dinyatakan pula oleh Ibu Suratni Umaili selaku Bendahara Desa Pontak:

“Sampai saat ini belum dapat terlihat kinerja dari badan pengawas. Baik badan pengawas maupun pengurus sama saja. Selain itu tingkat pengetahuan dari pengelolapun masih rendah. Kualitas dari para pemegang unit usaha masih perlu ditingkatkan. Hal ini jelas sangat mempengaruhi keoptimalan pelaksanaan BUMdes Pontak” (29 Maret 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa dari segi sumber daya manusia, pengelolaan BUMDes belum dapat dikatakan optimal, sebab sumber daya manusia yang ada belum efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta belum memiliki kesadaran penuh akan tanggungjawab yang diemban. Selain itu bisa jadi sumber daya manusia yang ditempatkan masih kurang dalam pembekalan materi terkait BUMDes sehingga banyak yang tidak bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pengukuran keoptimalan pengelolaan BUMDes dari segi SDM masih sangat kurang, dibuktikan dengan tidak berjalannya unit usaha dibidang peternakan dan tidak ada peningkatan usaha diunit peternakan. Hal ini menggambarkan jelas sejauh mana kompetensi pengelola unit usaha. Pengelola unit usaha dibidang peternakan cenderung tidak aktif dan tidak menjalankan tugas serta tanggungjawabnya, sementara pengelola dibidang pertanian, masih tergolong aktif namun belum ditunjang dengan pengetahuan dalam menjalankan unit usaha agar terjadi peningkatan atas usaha tersebut. Selain itu sebagian besar pengurus tidak turut aktif dalam mengelola BUMDes. Para badan pengawas juga belum berperan sebagaimana mestinya, kinerja para badan pengawas masih sangat minim bahkan dapat dikatakan tidak ada. Sehingga tidak ada pantauan dan upaya-upaya perbaikan yang lahir untuk memperbaiki pengelolaan BUMDes. Akibat selama empat tahun beroperasi BUMDes Pontak belum mengalami peningkatan justru malah penurunan kinerja.

Berdasarkan pemaparan pengukuran tiga indikator di atas yakni tujuan, pengambilan putusan alternatif, dan sumber daya manusia dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Pontak belum optimal. Hal ini dikarena dari ketiga

indikator tersebut, pengelolaan bumdes rata-rata masih kurang baik. Tidak adanya tujuan dibentuknya BUMDes yang tercapai, belum ada keputusan yang diambil terkait dengan perbaikan pengelolaan BUMDes, serta SDM yang ditempatkan pada structural belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Bumdes

Terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan BUMDes Pontak, diantaranya:

a. Lemahnya SDM Pengelola BUMdDes

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, SDM merupakan ujung tombak pelaksanaan BUMDes serta merupakan penentu keberhasilan pengelolaan BUMDes tersebut. Pentingnya keberadaan SDM disini ialah bertindak sebagai pelaksana atau tenaga kerja dari seluruh rangkain program usaha yang didirikan oleh Badan Usaha milik Desa. Oleh sebab itu sudah sepantasnya bahwa orang-orang yang berperan di dalam pengelolaan BUMDes adalah mereka yang memiliki pengetahuan terkait BUMDes dan memiliki kelayakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Semua SDM yang terkait dengan pengelolaan BUMDes Pontak, seharusnya bersedia secara sukarela memberikan dukungan serta kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Hal inilah yang melatar belakangi pendapat bahwa SDM yang bertugas dalam pengelolaan BUMDes Pontak masih sangat lemah. Lemahnya SDM yang dimaksud berkaitan dengan kurangnya pemahaman serta keaktifan dari pelaksanaan BUMDes Pontak itu sendiri. Dapat dilihat dari ketersediaan dan kesukarelaan para anggota yang mau menjalankan

unit-unit usaha yang terdapat dalam BUMDes Pontak. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Ibu Suratni Umaili selaku Bendahara BUMDes:

“Keaktifan pengurus BUMDes Pontak harus diakui masih sangat rendah, terus terang saya kewalahan karena hingga saat ini saya hanya bekerja sendiri. Pengurus yang lain sudah tidak aktif lagi. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman sebagian pengurus atas pelaksanaan BUMDes itu sendiri. Sebagian pengurus justru mengkhawatirkan persoalan upah mereka. Mereka tidak mau bekerja jika tidak ada upahnya. Padahal hal ini bisa dibicarakan dan ditaktisi bersama” (29 Maret 2021).

Keaktifan pengurus amat sangat menentukan kelancaran jalannya pengelolaan BUMDes Pontak. Ketidakaktifan dan kurangnya pemahaman SDM terkait, mengakibatkan mandatnya pengelolaan BUMDes itu sendiri atau dapat dikatakan bahwa sebagian besar terkandasnya pengelolaan BUMdes dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran pengurus akan pentingnya tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan BUMDEs Pontak. Pernyataan tersebut didukung dengan fakta yang ada bahwa tidak beroperasinya unit usaha di bidang peternakan dan kurang maksimalnya pendapatan dari unit usaha pertanian.

Selain itu, semua komponen yang terlibat di dalam pelaksanaan BUMDes Pontak harusnya mampu melakukan kerja sama yang baik. Kerja sama yang baik antar pengurus merupakan salah satu prinsip pengelolaan BUMDes (Herry Kamaroesid: 2016,20). Adanya kerja sama yang baik dapat dilihat dari keberhasilan setiap unit usaha yang dijalankan. Gagalnya atau tidak berjalannya unit usaha BUMDes Pontak sesuai dengan apa yang diharapkan dapat menggambarkan ukuran kerjasama yang dijalin. Dalam wawancaranya, Ibu Suratni Umuli selaku Bendahara BUMDes Pontak mengatakan bahwa:

“ kerjasama yang terjalin antar pengurus masih sangat kurang, sehingga keberhasilan pelaksanaan BUMDes Pontak masih jauh dari tujuan yang diharapkan” (29 Maret 2021).

Selain itu, peran kepala desa dalam memberikan pembinaan terkait pengelolaan BUMDes juga amat sangat penting. Berhasil dan tidaknya pengurus melaksanakan tugasnya juga dipengaruhi oleh bimbingan serta arahan dari kepala desa setempat. Tidak adanya perubahan perbaikan dari tahun ketahun membuktikan bahwa kurang maksimalnya penasehat dalam memberikan bimbingan terkait pelaksanaan kewajiban pengurus.

b. Kurangnya Disiplin Administrasi

Seluruh kegiatan usaha, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif (Herry Kamaroesid: 2016,20). Adanya pelaporan atau pertanggungjawaban secara administrasi yang rutin dapat memberikan kontrol tetap akan kondisi keuangan dan hal lain terkait usaha tersebut. Begitu pula dengan pelaksanaan BUMDes, diharuskan adanya laporan secara administrasi untuk mengetahui kondisi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, sehingga keuangan BUMDes dapat terkontrol dengan baik tentunya, hal ini wajib diberlakukan bagi seluruh BUMDes yang beroperasi di tanah air.

Terkait dengan disiplin administrasi, BUMDes Pontak Belum melaksanakan pembukuan secara teknis, sehingga tidak adanya keterbukaan mengenai administrasi baik keuntungan maupun kerugian dalam setiap unit kegiatan. Apembukau terkait BUMDes ini hanya sampai pada tahun 2019, tahun setelahnya tidak lagi ada pembukuan. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada langkah kedepan unit usaha BUMDes, dikarenakan tidak ada pelaporan secara administrasi maka keuangan unit usaha tidak dapat dikontrol dengan baik. Tidak terkontrolnya keuangan menyebabkan sulitnya mengidentifikasi masalah yang menyebabkan macetnya BUMDes Pontak dari segi tekhnis usahanya. Oleh sebab

itu disiplin laporan merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi kelancaran pengelolaan BUMDes Pontak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suratni Umaili selaku Bendahara BUMDes Pontak, beliau mengatakan bahwa:

“Tidak adanya pembukuan dari unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Pontak dikarenakan kurangnya SDM yang handal, disamping itu terlalu banyak yang harus diperbaiki di BUMDes Pontak baik dari SDMnya, program-programnya, oleh karena itu baiknya BUMDes dirombak dan direnakan kembali pelaksanaannya demi untuk kondisi usaha yang lebih baik kedepannya” (29 Maret 2021).

Bukti administrasi kelak nantinya akan dijadikan sebagai acuan pengukuran keberhasilan pembentukan unit usaha BUMDes. Sebagai alat ukur, tentunya seharusnya diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Hal ini juga yang menyebabkan pelaporan diwajibkan adanya. Sebab nantinya akan menjadi acua perbaikan bagi pengelolaan BUMDes pada periode mendatang atau bisa juga digunakan sebagai batu locatan untuk lebih baik tiap tahunnya.

Bukan hanya terkait dengan laporan perkembangan keuangan, namun laporan perkembangan usahapun, tidak dilaksanakan secara rutin. Alhasil sejauh mana usaha berjalan dan apakendala-kendala yang dihadapi tidak dapat diketahui. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada pengelolaan BUMdes itu sendiri, sebab laporan perkembangan usaha sangat membantu pihak terkait dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi, penyebab permasalahan dan memungkinkan untuk menemukan usaha penyelesaiannya. Sehingga kondisi BUMDes akan jauh lebih baik. Sayangnya hal ini luput dari para pihak pengelola BUMDes itu sendiri.

Tidak disiplinnya pengadaan laporan perkembangan usaha dan keuangan ini akan berpengaruh pada laporan pertanggungjawaban akhir masa bakti kepengurusan, bahkan dikhawatirkan laporan ini kelak akan ditiadakan. Jika

sudah begini maka akan lebih sulit lagi dalam mengupayakan perbaikan BUMDes Pontak kedepan.

Terjadinya penumpukkan laporan merupakan gambaran lemahnya tanggungjawab pengurus dalam menjalankan tugasnya. Laporan perkembangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengurus selama mengoperasikan unit usaha BUMDes Pontak, disamping itu ketidakdisiplinan atas laporan ini juga luput dari pengawasan para bidang pengawas.

c. Kurangnya Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat

Faktor penghambat yang berikut yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan BUMDes serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam keberhasilan unit usaha BUMDes. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa oleh pemerinrah desa mengenai keberadaan BUMdes dan program-program unit usaha didalamnya. Alhasil masyarakat yang memiliki pengetahuan terkait BUMdes sangatlah terbatas sehingga dukungan dari masyarakat pun sangatlah minim.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Pontak, dimana beliau mengakui bahwa masih minimnya kegiatan sosialisai terkait pelaksanaan serta perkembangan BUMDes Pontak sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih bisa jadi masyarakat masih minim pengetahuan atas pelaksanaan BUMDes tersebut. Ibu Deysi Susanti Sosiang Sekretaris Desa BUMDes

“Sosialisasi terkait pelaksanaan BUMDes itu sendiri masih kurang dilaksanakan sehingga berpengaruh pada tingkat pengetahuan masyarakat. Tentunya hal ini akan menjadi PR dan masuk pada rencana perbaikan BUMDes kedepan.” (1 April 2021)

Dari 5 orang warga desa yang penulis wawancarai, 4 diantaranya mengetahui adanya BUMDes namun rata-rata tidak mengetahui pasti terkait unit

usaha yang dijalankan BUMDes dan keadaan sekarang BUMDes Pontak sementara ini sinya sama sekali tidak mengetahui terkait BUMDes itu sendiri. Ibu Dewi Sartika Abdullah mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui ada BUMDes di desa Pontak yang sudah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir, namun saya belum mengetahui dengan pasti unit usaha yang didirikan oleh BUMDes” (1 April 2021)

Hal serupa juga dikemukakan oleh pihak lain, yakni Ibu Deli Yustika:

“Yang saya tau hanyalah usaha kios saprodi, selain itu saya masih buta terkait pelaksanaan BUMDes Pontak ini” (1 April 2021)

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa minimnya dukungan masyarakat atas pelaksanaan BUMDes memang didasarkan pada ketidaktahuan masyarakat terkait aktifitas dan perkembangan BUMDes Pontak itu sendiri. Hal ini tentu harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah setempat sebab tujuan awal didirikannya BUMDes adalah untuk membantu perekonomian desa dan masyarakat, sehingga akan sangat disayangkan apabila masyarakat setempat justru tidak mengetahui terlebih lagi tidak memberikan dukungan dan kontribusi lebih terkait pengelolaan BUMDes ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat ini diperparah dengan minimnya kesadaran dalam melakukan pengembalian piutang, sehingga dengan adanya kemacetan dalam pengembalian pinjaman ini berpengaruh terhadap terbatasnya modal yang dimiliki oleh unit usaha BUMDes Pontak. Jika berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan kerugian bahkan tidak dapat memutar kembali modal. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suratni Umuli selaku Bendahara BUMDes Pontak, beliau mengatakan bahwa:

“Ketika melakukan pinjaman, tidak sedikit masyarakat yang terjerat pinjaman macet atau tidak memulangkan pinjamannya sesuai dengan apa

yang disepakati sehingga sangat mempengaruhi kondisi keuangan unit usaha BUMDes Pontak” (20 Maret 2021).

Hal ini menggambarkan pula bahwa antara pengurus dan masyarakat desa belum terjalin komunikasi yang baik. Pembicaraan soal utang piutang belum maksimal, sehingga menyebabkan tidak sedikit kemacetan dalam pengembalian pinjaman.

4.2.3 Strategi yang Diterapkan untuk Pengoptimalan Pengelolaan BUMDes

Upaya mengoptimalkan pengelolaan BUMDes Pontak dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi atau cara, diantaranya adalah:

a. Mengganti Struktur PenanggungJawab Pengelolaan

Salah satu sebab tidak optimalnya pengelolaan BUMDes yakni tidak aktifnya tenaga kerja yang ditempatkan atau dipercayakan dalam pengelolaan BUMDes. Oleh sebab itu langkah awal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Pontak adalah mengubah kembali struktur kepengurusan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Zainudin Bolota selaku Kepala Desa Pontak, yakni:

“Dalam hal perbaikan, langkah awal yang akan kami lakukan adalah mengubah kembali struktur kepengurusan. Sebab struktur yang sekarang cenderung kurang aktif dan tidak mau kerja” (Zainudin Bolota: 2021)

Besarnya tanggungjawab yang dipikul oleh para pengelola BUMDes mengharuskan adanya pengelola yang senantiasa aktif menjalankan tugas-tugasnya sehingga tujuan dari BUMDes itu sendiri dapat tercapai. Pemerintah Desa menganggap bahwa banyaknya masalah yang dihadapi oleh BUMDes ini maka sudah seharusnya dalam perbaikan mengambil langkah perubahan secara keseluruhan, semacam melakukan perencanaan kembali terkait dengan pengelolaan BUMDes. Oleh sebab itu langkah awal yang akan diambil kedepan

adalah mengubah struktur kepengurusan BUMDes, dengan perubahan ini diharapkan dapat membuat pengelolaan BUMDes Pontak akan jauh lebih baik kedepannya serta diharapkan juga tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan di masa sekarang yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan BUMDes.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Desa Pontak mengakui bahwa keoptimalan pengelolaan BUMDes juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Banyak masalah yang timbul dikarenakan SDM yang kurang handal serta kurang paham terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan upaya peningkatan yang penting dilakukan.

Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dilakukan akan dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan pembinaan pegawai, pembekalan terkait tugas dan tanggungjawabnya serta pemberian arahan. Pengarahan yang dimaksud adalah berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah atau intruksi, dalam menjalankan tugas masing-masing agar tugas tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Termasuk pula pengarahan tentang tata cara pengelolaan BUMDes itu sendiri. Bapak Zainudin Bolota selaku Kepala Desa Pontak mengemukakan bahwa:

“Setelah perombakkan struktur, kami akan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini jelas dilakukan karena hasil kerja yang kelak akan dicapai sangat bergantung pada kualitas kerja pengelolanya, sehingga upaya ini akan sangat kami perhatikan” (29 Maret 2021).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, merupakan langkah yang tepat terkait upaya pengoptimalan pengelolaan BUMDes Pontak, sebab

kelancaran unit usaha akan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM pelaksananya. Semakin bagus kualitas SDMnya maka semakin terjamin pula keberhasilan tercapainya tujuan dari unit usaha BUMDes yang didirikan. Oleh sebab itu, upaya perbaikan yang dimulai dari memperbaiki pelaksananya merupakan upaya yang tepat bagi BUMDes Pontak.

c. Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang BUMDes

Pemberian pemahaman ini guna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat tentang BUMDes Pontak agar masyarakat dapat memberikan dukungan dan kontribusi langsung terhadap pengelolaan BUMDes. Sehingga dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pengelola BUMDes dan Masyarakat Desa Pontak.

Pemberian pemahaman ini akan dilakukan dengan berbagai cara, semisal akan diadakannya sosialisai-sosialisasi terkait pelaksanaan BUMDes serta program-program yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Pontak.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Sub bab Pembahasan hasil penelitian ini, penulis fokus pada hasil penelitian terkait dengan indikator pengukur optimalisasi pengelolaan BUMDes, yakni Tujuan, pengambilan keputusan alternatif, dan SDM.

4.3.1 Tujuan

Hasil penelitian terkait pengelolaan BUMDes Pontak menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Pontak belum berjalan kearah tujuan yang hendak dicapai. Terdapat unit usaha didua bidang, satu diataranya tidak beroperasi aktif dan satu sisanya belum maksimal dalam pelaksanaanya. Sementara tujuan dari BUMDes

Pontak yakni peningkatan ekonomi desa dan masyarakat. Tercapainya tujuannya ini jelas dipengaruhi lancarnya pengelolaan unit usaha yang ada di BUMDes Pontak. Terkandasnya unit usahatersebut, maka kandas pula pencapaian tujuan pendirian BUMDes Pontak.

H.R Daeng Naja mengemukakan bahwa tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dimasa yang akan datang. Ida Nuraida berpendapat bahwa tujuan merupakan bagian dari fungsi perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen. Sementara beargumen yakni tujuan merupakan kunci untuk menentukan atau merumuskan apa yang akan dikerjakan, ketika pekerjaan itu harus dikerjakan dan disertai pula dengan jaringan politik, prosedur, anggaran, serta penentuan pogram. (Carapedia:2016)

Berhubungan dengan teori tersebut, berdirinya BUMDes Pontak tentu didasarkan pada tujuan tertentu. Peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, merupakan hal yang ingin dicapai dari dibentuknya BUMDes.

Pemerintah Desa Pontak membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Pontak. BUMDes Pontak berdiri pada tahun 2017 dengan SK Sangadi Nomor 3 Tahun 2017 tentang BUMDes Pontak dilengkapi dengan susunan pengurus BUMDes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurang lebih BUMDes Pontak ini sudah berjalan selama 4 tahun. Selain untuk mngelola potensi desa, BUMDes juga ditargetkan sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat untuk menuntaskan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Nugrahanini, falikhatum, dan Jaka Winarn dengan judul pnelitian Optimalisasi Dana Desa dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa menuju Desa Mandiri Pada Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, dalam hasil penetian dikemukakan bahwa tujuan didirikannya BUMDes Belum terpenuhi karena terdapat lima unit usaha pada BUMDes tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelaksanaan BUMDes tersebut kurang optimal.

4.3.2 Pengambilan Keputusan Alternatif

Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMDes sudah dipraktekkan sedari awal. Banyaknya peluang usaha diberbagai bidang menuntut pengurus BUMDes dapat menentukan pilhan untuk awal mula pendirian unit usaha BUMDes. Dari berbagai peluang usaha, pengurus BUMDes Pontak menjatuhkan keputusan pada pilihan pendirian unit usaha dibidang pertanian dan peternakan. Namun dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala yang mengakibatkan BUMDes Pontak tidak berjalan sesuai rencana awal.

Kondisi ini mengharuskan pengurus BUMDes Pontak memiliki alternatif keputusan lain demi berjalannya unit usaha BUMDes sebagaimana mestinya. Sebab pengambilan keputusan alternatif dilakukan guna mencapai tujuan awal yang telah direncanakan.

Tuntutan pengambilan keputusan lain ini yang tidak mampu dipenuhi oleh para pengurus BUMDes Pontak. Hingga kini belum ada upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes Pontak itu sendiri. Pelaksanaan upaya inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai keputusan akternatif yang diambil untuk menjamin kelancaran pengelolaan BUMDes dalam mencapai

tujuan yang dimaksud sedari awal. Sebab pada dasarnya keputusan alternatif merupakan keputusan yang dibuat atas keputusan lain demi mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan.

Upaya perbaikan ini dapat berupa strategi yang diterapkan oleh pengurus BUMDes Pontak dalam mengoptimalkan pengelolaan BUMDes. Terkait strategi itu sendiri telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya di sub bab 4.2.3 tentang strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan BUMDes Pontak.

Keputusan harus dibuat atas keputusan lain yang diberikan. Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan mereka. Tentu saja, alternatif pengambilan keputusan yang tersedia adalah alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pembuat keputusan. Keputusan alternatif adalah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.

Sama halnya dengan pelaksanaan BUMDes, demi mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal, tentu diperlukannya alternatif-alternatif keputusan untuk menjaga kestabilan pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Kamus besar ilmu pengetahuan memuat bahwa, pengambilan keputusan adalah pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya satu alternatif tidak akan ada keputusan yang diambil (Dagun M: 2006,815). Hal ini senada dengan pendapat Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih (Ibnu Syamsi: 2000,5).

Definisi pengambilan keputusan menurut Dermawan, dapat dinyatakan sebagai ilmu dan seni pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan dari sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang tersedia guna menyelesaikan

masalah. Pengambilan keputusan juga dapat didefinisikan sebagai stidu langkah-langkah pengambilan keputusan atau tata cara pengambilan keputusan yang baik (Dermawan: 2004,4).

Pada umumnya para penulis sependapat bahwa kata putusan berarti pilihan yaitu pilihan antara dua atau lebih kemungkinan, dan pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan, masa yang akan datang, diamana efek dan pengaruhnya berlangsung cukup lama.

Banyaknya pandangan tentang pengambilan keputusan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada secara sistematis digunakan untuk menyelesaikan masalah demi tercapainya atau terwujudnya tujuan serta hasil yang diinginkan atau direncanakan sejak awal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nana Mulyana, Anisa utami dan Simon Sumanjoyo Hutagalung dengan judul Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, hasil penelitiannya yakni tidak optimalnya pengelolaan BUMDes pada desa tersebut, hanya saja dalam prakteknya pemerintah setempat telah melakukan pengambilan keputusan alternatif demi mengatasi maslah yang timbul pada pengelolaan BUMDes Desa. Keputusan alternatif yang diambil yakni diadakannya peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Kecamatan (BUMDes) di Desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang dikhususkan untuk peningkatan kualitas pengelola sumber daya manusia. Keputusan ini yang menjadi alternatif dalam penanganan masalah dalam

pengelolaan BUMDes sehingga pengelolaan BUMDes pada desa terkait dapat diupayakan keoptimalannya.

4.3.3 Sumber Daya Alam

Terkait dengan tugas dan kewajiban tersebut, pengurus BUMDes Pontak belum disiplin dalam menunaikan tugas tersebut. Terbukti dengan tidak rutinnya pelaporan hasil kinerja setiap bulan atau tahun kepada atasannya, sehingga banyak terjadi penumpukkan didalam pelaporan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Suratni Umaili selaku Bendahara BUMDes Pontak:

“Terkait laporan itu sendiri harus diakui bahwa kami belum disiplin dalam pemberian laporan, sebab banya yang belum kami pahami serta terjadi banyak penumpukkan laporan” (29 Maret 2021).

Selain itu, tidak beroperasinya unit usaha dengan maksimal, menggambarkan jelas kondisi atau kualitas SDM yang terkait, Baik dari pengelola, pengurus maupun badan pengawas.

Unit uaha bidang peternakan tidal lagi beroperasi sementara unit usaha dibidang pertanian tidak maksimaldalam pengelolaannya. Hal ini menunjukkan tingkat kompetensi pengelola masih rendah dan memerlukan bimbingan dan pembekalan lebih terkait peningkatan kualitas SDM pngelola BUMDes Pontak.

Menurutr Sayuti Hasibuan (2000,3) sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat didalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organsasi tersebut.

Nawawi (2003,37) membagipengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara

atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun yang belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengerian sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, kariyawan, pekerja, tenaga kerja, dll.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah semua pekerja yang terlibat dalam mencapai tujuan perusahaan. BUMDes seharusnya akan menjaadi usaha yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menyebabkan distrosi ekonomi di pedesaan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka sudah sepantasnya Sumber Daya Manusia yang berperan dalam lembaga ini merupakan Sumber Daya Manusia yang unggul, baik itu sebagai pengurus, pengawas, serta masyarakat penunjang pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya, para pihak terutama pengurus paham betul akan tugas dan fungsinya dalam mengelola BUMDes.

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa kewajiban pengurus organisasi BUMDes adalah mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- a) Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada kepala desa.
- b) Menyampaikan laporan akhir masa bakti yang ditujukan kepada kepala desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitoan yang dilakukan oleh Nana Mulyana, Anisa utami dan Simon Sumanjoyo Hutagalung dengan judul Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, hasil penelitiannya yakni tidak optimalnya pengelolaan BUMDes diakibatkan oleh sumber daya manusia yang kutang komputen sehingga diadakannya peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Kecamatan (BUMDes) di Desa Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang dikhususkan untuk peningkatan kualitas pengelola sumber daya manusia. Dari usha peningkatan tersebut terlihat bahwa rata-rata pemahaman peserta terhadap tugas dan tanggungjawabnya mengalami peningkatan sebesar 28,37%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan BUMDes Pontak Kecamatan Kaidipang belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari tiga indikator pengukur yakni tujuan, keputusan alternatif, dan sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut belum dijalankan dengan baik.
2. Tujuan dari dibentuknya BUMDes Pontak Kecamatan Kaidipang ini hingga kini belum tercapai bahkan beberapa unit usaha justru tidak berjalan.
3. Keputusan Alternatif yang menjadi indikator pengukur kedua belum dapat dipraktekan dengan baik pada pelaksanaan BUMDes Pontak, dibuktikan dengan Tidak adanya keputusan alternatif yang diambil untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes Pontak.
4. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Pontak belum handal dalam melakukan pengelolaan dibuktikan dengan banyaknya pengurus yang kurang aktif, macetnya laporan rutin, dan tidak adanya keuntungan yang masuk ke desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang penulis harap dapat mewujudkan perbaikan dan berguna bagi berbagai pihak yang terlibat, yakni:

1. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur keoptimalan pengelolaan BUMDes Pontak masih terbatas pada tiga indikator, yakni tujuan, keputusan alternatif, dan sumber daya manusia. Tentunya masih banyak indikator pengukuran keoptimalan pengelolaan itu sendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan indikator pengukur lain.
2. Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan BUMDes Pontak ada tiga, yakni lemahnya SDM pengelola BUMDes, kurangnya disiplin administrasi, dan kurangnya pengetahuan dan partisipasi dari masyarakat Desa Pontak hal ini dapat diperbaiki dengan menggunakan strategi yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes Pontak. Strategi digunakan oleh Pemerintah Desa Pontak untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yakni, mengganti struktur pengelola BUMDes, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan BUMDes, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Adiwarman.A.Karim, Ekonomi Mikro Islam, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Amri, Khairul, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015.
- Anwar Basri, “Kontribusi BUMDes Dalam Pembangunan Ekonomi Desa”. Jurnal Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kulitatif. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Atshil, M. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017 .
- Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 14 No. 3, September, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2002
- Edy Yusuf Agunggunanto Dkk. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Vol 13 No 1 2016.
- Hadi Payitno, Budi Santoso, Ekonomi Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996.
- HAW Widjaja, Otonomi Desa (merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh), Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Jonnius, “Analisis Kinerja Karyawan BUMDes Di Kabupaten Kampar”. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17, No.1, Januari-Juni 2014.
- Kadek Sumiasih, “Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Studi Di Desa Pakse Bali Kabupaten Klungkung”. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4, Desember 2018.
- Kamaroesid, Herry. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Mitra Wacana media, Jakarta, 2008.
- Mardikanto, Totok. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 2012.

- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul", Jurnal Modus, Vol. 28 No.2, Yogyakarta, 2016.
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : Universitas Indonesia (UIPress). 2007.
- Surya, Putra. Buku 7 Badan Usaha Milik desa: Spirit Kolektif desa, Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.
- Niswaton Hasanah, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik". QIEMA (Qomaruddin Islami Economy Magazine), Vol.5 No.1, Februari, 2019.
- Ratna Aziz Prasetyo, Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Dialektika, Vol.XI No.1, Maret, 2016.
- Rosa, Maria. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2016
- Rufaidah Aslamlah, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggunharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Seyadi. Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN. 2003.
- Sri Kusuma Dewi, Amelia. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, Volume V No. 1 Februari 2014.
- Todaro, Michael P, dan Stephen, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2006.
- UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
- Zartika, Cica. "Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna", Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari, 2016

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Zainudin Bolota, S.Ap	Kepala Desa
2	Deysi Susanti Sosiang,S.Sos.I	Sekretaris Desa
3	Nurkameli Yarbo	Kaur Keangan
4	Suratni Umaili	Bendahar BUMDes
5	Deli Yustika	Masyarakat
6	Dewi Sartika Abdullah	Masyarakat

DAFTAR PERTANYAAN

Tujuan

1. Apa saja tujuan pendirian BUMDes Pontak?
2. Bagaimana capaian dari tujuan tersebut?
3. Apa kendala yang ditemui dalam pencapaian tujuan?

Keputusan Alternatif

1. Apa saja keputusan yang diambil sejak awal pendirian?
2. Apa ada alternatif lain yang disiapkan bisa keputusan awal yang diambil tidak berjalan sesuai rencana?
3. Bagaimana upaya pengadaan alternatif keputusan lain untuk memperbaiki jalannya BUMDes?

Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang berpelean dalam pengelolaan BUMDes?
2. Bagaimana kualitas sumber daya manusia pengelola unit usaha BUMDes?
3. Bagaimana upaya peningkatan sumber daya manusia pengelola BUMDes?

Tambahan

1. Apa faktor-faktor penghambat jalannya BUMDes?
2. Bagaimana strategi peningkatan pengelolaan BUMDes?

DOKUMENTASI

**KEPALA DUSUN II
HAMID SOSIANG**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3098/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Pontak

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sry Dewi Meamogu

NIM : E1117044

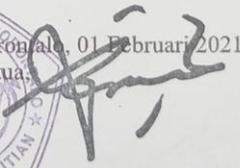
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : DESA PONTAK KECAMATAN K AidIPANG KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA

Judul Penelitian : OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 01 Februari 2021
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN K AidIPANG
DESA PONTAK**

Jln Desa Pontak Kode Pos 95765

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/2005/85/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainudin Bolota, S.AP
NIP : 19731225 200906 1 003
Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda, III A
Jabatan : Sangadi Desa Pontak

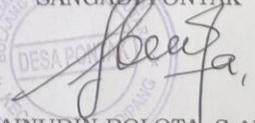
Dengan ini memberikan Surat Keterangan kepada:

Nama : Sry Dewi Meamogu
Nim : E1117044
Jabatan/Tempat/Indentitas : Peneliti/Desa Pontak Kecamatan
Kaidipang/ Desa Pontak Kecamatan
Kaidipang Kab.Bolaang Mongondow
Utara Provinsi Sulawesi Utara

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian
Dengan Judul Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pada Desa
Pontak Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Demikian Surat Keterangan dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pontak, 29 April 2021

SANGADI PONTAK

ZAINUDIN BOLOTA, S.AP
NIP: 19731225 200906 1 003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0884/UNISAN-G/S-BP/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SRY DEWI MEAMOGI
NIM : E1117044
Program Studi : Akuntansi (S1)
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Judul Skripsi : Optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa
(pada desa pontak kecamatan kaidipang)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 25%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 November 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SRY SKRIPSI TURNITY.doc
 Aug 18, 2021
 13598 words / 90647 characters

E.11.17.044

SKRIPSI_SRI DEWI MEAMOGU.doc

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	repo.iain-tulungagung.ac.id INTERNET	4%
2	repository.radenintan.ac.id INTERNET	2%
3	ejournal.umm.ac.id INTERNET	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id INTERNET	2%
5	kalimenengkemiri.files.wordpress.com INTERNET	1%
6	repository.umy.ac.id INTERNET	1%
7	repository.umrah.ac.id INTERNET	1%
8	jurnal.polinela.ac.id INTERNET	<1%
9	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
10	ejournal.ipdn.ac.id INTERNET	<1%
11	docplayer.info INTERNET	<1%
12	ejournal.unsrat.ac.id INTERNET	<1%
13	www.revormer.com INTERNET	<1%
14	media.neliti.com INTERNET	<1%
15	blog.iain-tulungagung.ac.id INTERNET	<1%
16	jurnal.iain-bone.ac.id INTERNET	<1%

8/18/2021

SKRIPSI_SRI DEWI MEAMOGU.doc - E:11.17.044

17	digilib.iain-palangkaraya.ac.id INTERNET	<1%
18	id.123dok.com INTERNET	<1%
19	123dok.com INTERNET	<1%
20	jurnal.uts.ac.id INTERNET	<1%
21	blog.binadarma.ac.id INTERNET	<1%
22	repository.iainpare.ac.id INTERNET	<1%
23	akhirmh.blogspot.com INTERNET	<1%
24	www.scribd.com INTERNET	<1%
25	kkn.unnes.ac.id INTERNET	<1%
26	proceeding.unnes.ac.id INTERNET	<1%
27	tegowanukulon-grobogan.desa.id INTERNET	<1%
28	www.kumbang.desa.id INTERNET	<1%
29	repository.univ-tridinanti.ac.id INTERNET	<1%
30	desarajunpasongsongan.blogspot.com INTERNET	<1%
31	repository.ummat.ac.id INTERNET	<1%
32	www.slideshare.net INTERNET	<1%
33	www.ejournal-s1.undip.ac.id INTERNET	<1%
34	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
35	repository.unsri.ac.id INTERNET	<1%
36	desasorolambu.blogspot.com INTERNET	<1%
37	dewiblog511.blogspot.com INTERNET	<1%
38	digilib.uin-suka.ac.id INTERNET	<1%
39	jurnal.fh.unila.ac.id INTERNET	<1%
40	repository.fisip-untirta.ac.id INTERNET	<1%

8/18/2021

SKRIPSI_SRI DEWI MEAMOGU.doc - E:11.17.044

41 www.humaspro.muaraenimkab.go.id
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI



Sry Dewi Meamogu, lahir pada tanggal 19 Desember 1998, beragama Islam, jenis kelamin perempuan. Tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kecamatan Kaidipang, Desa Pontak. Anak ke tiga Dari Pasangan Bapak Harun Meamogu (Alm) dan Ibu Rabia Napu.

B. RIWAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 1 Pontak, Lulus Tahun 2010
- b. SMP Negeri 2 Kaidipang, Lulus 2013
- c. SMK Negeri 1 Kaidipang, Lulus Tahun 2016
- d. Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Di Universitas Ichsan Gorontalo jurusan akuntansi pada tahun 2017

2. Pendidikan Non formal

- a. Mengikuti organisasi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2017
- b. Mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang diselenggarakan oleh (HMI Cabang Gorontalo) pada tahun 2017